

Dirut Pertamina Akui Tak Hanya Depo Plumpang yang Harus Benahi Buffer Zone

Direktur Utama PT (Persero), mengungkapkan, tidak hanya jarak aman atau buffer zone Depo Plumpang, Jakarta Utara, yang harus dibenahi karena semakin dipadati oleh pemukiman warga. Nicke menjelaskan lahan Depo Plumpang awalnya dimiliki seutuhnya oleh Pertamina seluas 153 hektare di tahun 1971. Namun seiring waktu berjalan, luas fasilitas instalasi minyak hanya 72 hektare, sisanya sudah dihuni oleh warga termasuk Tanah Merah seluas 58 hektare. "Ini bukan hanya di Plumpang saja warga yang mendekat, tadinya lahan milik Pertamina aset kami, ini ada di beberapa daerah khususnya terminal BBM di kota-kota besar, akan kita sama-sama lakukan pembangunan buffer zone," ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (14/3). Dia memaparkan beberapa lokasi yang harus dibenahi tata letaknya, yaitu terminal BBM dan kilang. Khusus untuk lokasi pipa BBM dan pipa gas, kata dia, masih dalam tahap identifikasi. "Di tempatnya Pak Alfian (Dirut Patra Niaga) ada 9 lokasi yang perlu dilakukan buffer zone yang memang harus, kemudian di kilang itu ada 3 lokasi," ungkap Nicke. Menurut Nicke, untuk menghindari insiden serupa terjadi lagi, solusinya harus dibereskan di akar masalahnya. Adapun pembangunan buffer zone, terutama di Depo Plumpang, akan berdampak juga terhadap relokasi sebagian warga. Hal ini mengingat opsi menutup langsung Depo Plumpang tidak mungkin dilakukan karena akan mengganggu pasokan BBM nasional, sehingga langkah sementara yaitu membuat buffer zone di sekitar Depo Plumpang. "Warga ini yang (relokasi) di buffer zone, karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup karena ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," tegasnya. Dia memaparkan, Depo Plumpang tidak hanya menyimpan pasokan BBM, melainkan fasilitas lain yang berkaitan dengan LPG, pelumas, dan pusat teknologi. Depo tersebut menyimpan 15 persen pasokan BBM untuk menyuplai 790 SPBU di 19 kabupaten/kota. Dengan begitu, Depo Plumpang memiliki peran yang strategis untuk rantai pasok energi nasional. Menurut dia, menutup dan memindahkan depo secara langsung pasti akan mengganggu distribusi nasional. "Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya jawabannya adalah 'dan', tapi time frame

yang berbeda maksudnya warga di sini adalah buffer zone," jelas Nicke.